

825 -
17/3-2025

**EVALUASI PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH MELALUI
PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KELURAHAN BANDARHARJO
KOTA SEMARANG**

Shafa Zahra Nurprasetyarani, Sri Suwitri

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: www.fisip.undip.ac.id Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The KOTAKU Program aims to improve the quality of slum settlements to enhance the living conditions of the community. Bandarharjo Village faces challenges such as high population density, limited land availability, and inadequate infrastructure. This study aims to analyze the improvement of slum settlements through the KOTAKU Program and identify its supporting and inhibiting factors in Bandarharjo Village, Semarang City. The research employs a qualitative descriptive method using Stufflebeam's (1995) program evaluation approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the KOTAKU Program contributes to improving the quality of slum settlements through restoration, renewal, and resettlement. Restoration is carried out by improving basic infrastructure, such as neighborhood roads, drainage systems, and waste management facilities, which enhance accessibility and cleanliness in the area. Renewal includes the provision of Green Open Spaces (RTH), public sanitation facilities (MCK), and sanitation systems, which have a positive impact on the community's quality of life, although they remain suboptimal due to land limitations and maintenance issues. Additionally, the distribution of clean water remains uneven, and the area lacks fire safety equipment. Meanwhile, resettlement has not been a primary priority in the program's implementation. Based on the CIPP evaluation, the context aspect is supported by the program's alignment with its target and community participation and awareness. In the product aspect, the program has improved access to basic services. In the input aspect, information access and government support serve as supporting factors, but budget constraints and limited implementation duration remain obstacles. Meanwhile, the process aspect becomes the main challenge due to suboptimal infrastructure quality, despite being supported by human resource capacity and institutional management. Therefore, a more comprehensive strategy is needed in budget management, land utilization, and inter-agency coordination to enhance the program's effectiveness and sustainability.

Keywords: *Evaluation, Slum Settlements, Slum Settlement Quality Improvement, KOTAKU Program.*

ABSTRAK

Program KOTAKU bertujuan meningkatkan kualitas permukiman kumuh guna memperbaiki kondisi hidup masyarakat. Kelurahan Bandarharjo menghadapi tantangan seperti kepadatan penduduk, keterbatasan lahan, dan infrastruktur yang belum memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui Program KOTAKU serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya di Kelurahan Bandarharjo, Kota Semarang. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan evaluasi program Stufflebeam (1995), dengan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program KOTAKU berkontribusi terhadap peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali. Pemugaran dilakukan melalui perbaikan infrastruktur dasar, seperti jalan lingkungan, drainase, dan sarana persampahan, yang meningkatkan aksesibilitas serta kebersihan kawasan. Peremajaan meliputi penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), fasilitas MCK umum, serta sistem sanitasi, yang berdampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat meskipun belum optimal akibat keterbatasan lahan dan pemeliharaan. Selain itu, distribusi air bersih belum merata, dan wilayah ini belum dilengkapi alat pengaman kebakaran. Sementara itu, aspek pemukiman kembali belum menjadi prioritas utama dalam implementasi program. Berdasarkan evaluasi CIPP, faktor pendukung dalam aspek context adalah kesesuaian sasaran program serta partisipasi dan kesadaran masyarakat. Dalam aspek product, program telah meningkatkan akses layanan dasar. Pada aspek input, akses informasi dan dukungan pemerintah menjadi faktor pendukung, tetapi masih terkendala anggaran serta durasi pelaksanaan yang terbatas. Sementara itu, aspek process menjadi hambatan utama akibat kualitas infrastruktur yang belum optimal, meskipun didukung oleh kapasitas dan kelembagaan SDM. Oleh karena itu, diperlukan strategi lebih komprehensif dalam pengelolaan anggaran, pemanfaatan lahan, serta koordinasi antar-pihak agar program lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Evaluasi, Permukiman Kumuh, Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh, Program KOTAKU.

Pendahuluan

Administrasi publik merupakan disiplin ilmu yang berfokus pada pengelolaan organisasi publik, termasuk implementasi kebijakan serta penyelesaian permasalahan sosial dalam masyarakat. Chandler dan Plano (1988) menyatakan bahwa administrasi publik memiliki peran dalam pelaksanaan regulasi dan kebijakan publik, sementara Keban (2008) menegaskan bahwa pemerintah memiliki otoritas dalam mengatur kepentingan masyarakat. Administrasi publik juga berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam memastikan efektivitas kebijakan serta optimalisasi layanan publik.

Salah satu tanggung jawab pemerintah dalam administrasi publik adalah penyediaan permukiman yang layak. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 menegaskan bahwa rumah layak huni harus memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan aksesibilitas bagi seluruh masyarakat. Upaya ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) pilar 11, yang menargetkan penyediaan perumahan layak, penataan kawasan kumuh, serta pengurangan dampak lingkungan di wilayah perkotaan. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran strategis dalam menjamin akses terhadap perumahan yang

aman dan berkelanjutan sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, permasalahan permukiman kumuh menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan perkotaan di Indonesia. Pada tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 279.390.258 jiwa, dengan laju pertumbuhan sebesar 0,82% dari tahun sebelumnya (Kompas, 2024). Peningkatan populasi, baik akibat pertumbuhan alami maupun urbanisasi, berkontribusi terhadap perkembangan kawasan permukiman kumuh di perkotaan (Prayojana et al., 2020). Menurut Trifita dan Amaliyah (2020), peningkatan populasi ini menyebabkan munculnya permukiman kumuh di lahan-lahan kosong perkotaan, yang pada akhirnya menghambat pencapaian pembangunan kota yang berkelanjutan.

Dalam menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah menetapkan penanganan permukiman kumuh sebagai prioritas nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Beberapa target strategis dalam sektor perumahan dan permukiman mencakup peningkatan akses terhadap air minum layak (100%), sanitasi layak (90%), serta pengelolaan sampah yang lebih baik. Selain itu, pemerintah menargetkan pengurangan luas kawasan

permukiman kumuh hingga 10.000 hektare (Perpres No. 18 Tahun 2020).

Sebagai bentuk implementasi kebijakan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengeluarkan Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh, yang bertujuan untuk mengurangi kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Salah satu program unggulan dalam kebijakan ini adalah Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), yang mendukung pencapaian Gerakan 100-0-100 (100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi layak) (kotaku.pu, 2016).

Program KOTAKU dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah daerah sebagai pelaksana utama dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai penggerak partisipasi masyarakat dalam perbaikan infrastruktur permukiman. Pelaksanaan program ini terbagi dalam empat tahap, yaitu persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan (Surat Edaran No. 40/SE/DC/2016). Kota Semarang menjadi salah satu daerah yang aktif dalam implementasi program ini. Pemerintah Kota Semarang menetapkan strategi penanganan permukiman kumuh melalui Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) 2011-2031 serta Peraturan Wali Kota Semarang No. 19 Tahun 2023 tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Tahun 2022-2026. Dokumen RP2KPKPK ini mengatur kebijakan strategis dalam menangani dan mencegah pertumbuhan kawasan kumuh di Kota Semarang. Berdasarkan SK Wali Kota Semarang No. 050/275 Tahun 2021, luas kawasan kumuh di Kota Semarang mencapai 431,54 hektare, dengan Kecamatan Semarang Utara sebagai wilayah dengan luas permukiman kumuh terbesar (60,1 hektare). Salah satu kelurahan yang menjadi fokus dalam program ini adalah Kelurahan Bandarharjo, yang memiliki kawasan kumuh seluas 4,26 hektare.

Kelurahan Bandarharjo merupakan kawasan pesisir yang berbatasan langsung dengan Terminal Peti Kemas dan Pelabuhan Tanjung Mas. Dengan luas wilayah sekitar 342,68 hektare, kelurahan ini terbagi menjadi 12 RW dan 103 RT, serta memiliki jumlah penduduk sebanyak 20.233 jiwa dalam 4.429 kepala keluarga. Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri pengasapan ikan, menjadikan wilayah ini dikenal sebagai Sentra Pengasapan Ikan di Kota Semarang. Selain itu, banyak warga yang bekerja sebagai nelayan, pengrajin, dan buruh di sektor perdagangan.

Sebagai kawasan pesisir, Bandarharjo menghadapi tantangan lingkungan yang kompleks, termasuk tingginya risiko banjir rob yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dan menurunkan kualitas hunian. Permukiman kumuh di kelurahan ini tersebar di beberapa RT dan RW, seperti RT 6/RW 2, RT 8/RW 3, RT 1/RW 3, RT 4/RW 3, dan RT 1/RW 5, yang berbatasan langsung dengan Kali Semarang di sebelah barat dan Kalibaru di sebelah selatan. Sungai-sungai ini mengalami stagnasi air, yang sering kali menimbulkan bau tidak sedap dan memperburuk kondisi sanitasi lingkungan.

Meskipun Program KOTAKU telah diterapkan di Bandarharjo, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah kondisi geografis Bandarharjo yang rentan terhadap banjir rob, yang menyebabkan kerusakan pada infrastruktur yang telah dibangun. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan signifikan. Anindita (2021) mencatat bahwa dana yang dialokasikan melalui Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) masih belum mencukupi untuk menangani seluruh permasalahan permukiman kumuh, terutama akibat pengalihan anggaran untuk penanganan COVID-19. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya program, terutama

dalam aspek pengelolaan sampah dan sanitasi.

Selain tantangan teknis dan finansial, Program KOTAKU juga menghadapi kendala sosial, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya infrastruktur yang telah dibangun. Rendahnya kesadaran warga dalam menjaga kebersihan lingkungan serta minimnya fasilitas pembuangan sampah mengakibatkan penumpukan sampah, yang berdampak negatif terhadap kondisi permukiman (Purba & Marom, 2021).

Permasalahan di Bandarharjo menunjukkan bahwa peningkatan kualitas permukiman kumuh tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi yang saling berkaitan. Oleh karena itu, evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk menilai efektivitas implementasi Program KOTAKU dalam mencapai tujuan yang telah dirancang dalam dokumen RP2KPKPK. Penelitian ini menggunakan model evaluasi Stufflebeam (1995), yang mencakup aspek *context*, *input*, *process*, dan *product*. Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dalam implementasi Program KOTAKU di Bandarharjo, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian program dengan strategi yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan kajian penelitian yang sebelumnya, terutama dalam lokasi, fokus kajian, indikator evaluasi, dan pendekatan teori. Penelitian sebelumnya banyak menyoroti aspek administratif, implementasi kebijakan, atau tahap pelaksanaan Program KOTAKU di berbagai daerah dengan teori seperti William N. Dunn, Jan Merse, dan Bridgman & Davis. Sementara itu, penelitian ini mengevaluasi peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui Program KOTAKU di Kelurahan Bandarharjo, Kota Semarang, dengan merujuk pada Peraturan Wali Kota Semarang No. 19 Tahun 2023 dan menggunakan model evaluasi Stufflebeam (1995): *context, input, process, dan product*, yang memberikan tinjauan lebih menyeluruh terhadap program tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui Program KOTAKU di Kelurahan Bandarharjo, Kota Semarang. Pendekatan ini berlandaskan filsafat postpositivisme dengan teknik purposive sampling, pendekatan triangulasi, dan analisis data secara induktif. Evaluasi program dilakukan menggunakan model Stufflebeam (CIPP)

yang mencakup empat aspek utama: *context, input, process, dan product*. Lokasi penelitian ditetapkan di RW 2, RW 3, dan RW 5 berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 050/275 Tahun 2021 tentang Lokasi Permukiman Kumuh di Kota Semarang. Fenomena yang dikaji mencakup peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui tiga pendekatan: pemugaran (perbaikan jalan lingkungan, drainase, sarana persampahan), peremajaan (ruang terbuka hijau, sanitasi, air bersih, pengamanan kebakaran), serta pemukiman kembali (penyediaan bangunan gedung bagi warga terdampak). Informan dipilih dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling, terdiri dari staf Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang, anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), serta penerima manfaat program, dengan total 9 orang.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data, serta kesimpulan dan verifikasi. Untuk memastikan validitas data, digunakan metode triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai pihak, yaitu LKM, PSM, dan masyarakat Kelurahan Bandarharjo. Pendekatan ini

bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai efektivitas Program KOTAKU dalam meningkatkan kualitas permukiman kumuh di Bandarharjo.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini mengevaluasi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh melalui Program KOTAKU di Kelurahan Bandarharjo, Kota Semarang, dengan merujuk pada Peraturan Wali Kota Semarang No. 19 Tahun 2023, khususnya Bab V tentang Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh. Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini mengandalkan wawancara, observasi, dan telaah dokumen untuk mendeskripsikan serta menganalisis peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui program ini. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program. Informan yang dilibatkan terdiri dari pihak-pihak yang memiliki pemahaman mendalam terkait implementasi program, termasuk pemerintah daerah, pelaksana program, dan masyarakat penerima manfaat. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, yang menggambarkan kondisi lapangan, implementasi program, serta kendala yang

dihadapi dalam upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh.

Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh melalui Program KOTAKU di Kelurahan Bandarharjo Kota Semarang

Pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Bandarharjo telah selesai, sehingga diperlukan evaluasi untuk menilai pencapaian, efektivitas, dan dampaknya dalam meningkatkan kualitas permukiman. Evaluasi ini mengacu pada pola penanganan yang diatur dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Semarang No. 19 Tahun 2023, khususnya Bab V tentang Konsep Strategis Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh Perkotaan, yaitu sebagai berikut:

1. Pemugaran

Pemugaran merupakan rencana perbaikan bangunan dan infrastruktur tanpa mengubah struktur utama, yang diimplementasikan melalui rehabilitasi fisik serta peningkatan fasilitas umum.

a. Jalan Lingkungan

Program KOTAKU di Kelurahan Bandarharjo meningkatkan infrastruktur jalan, mobilitas, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Sebelum perbaikan, jalan rusak akibat banjir rob dan kendaraan berat, menghambat akses warga. Program ini melakukan pengecoran beton 157 meter di RT 08 RW 03 dan

pemasangan paving 27 meter di RT 08 RW 02, sesuai musyawarah warga dan SK Wali Kota Semarang. Hasilnya, akses ke fasilitas umum lebih lancar, perdagangan berkembang, serta interaksi sosial meningkat. Namun, masih ada ruas jalan yang belum diperbaiki karena keterbatasan anggaran dan kewenangan. Oleh karena itu, koordinasi lebih lanjut diperlukan agar perbaikan lebih optimal dan merata.

b. Drainase Lingkungan

Program KOTAKU di Bandarharjo memperbaiki sistem drainase untuk mengurangi genangan akibat banjir rob. Wilayah ini menghadapi sedimentasi, penyumbatan sampah, dan kapasitas saluran yang tidak memadai, memperburuk banjir dan risiko penyakit. Program ini menangani masalah tersebut dengan pengerukan sedimentasi, perbaikan saluran, serta pemasangan buis beton sepanjang 1.506 meter di beberapa RT dan RW prioritas. Dampaknya, genangan berkurang, risiko banjir menurun, dan kesehatan lingkungan membaik. Namun, tantangan dalam pemeliharaan drainase masih ada karena kebiasaan warga membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu, edukasi dan pemeliharaan infrastruktur

perlu ditingkatkan agar manfaat program berkelanjutan.

c. Sarana dan Prasarana Persampahan (PSP)

Program KOTAKU di Bandarharjo meningkatkan pengelolaan sampah dengan membangun dan memperbaiki TPS di RW 02, RW 03, dan RW 05 serta menyediakan gerobak sampah. Sebelum program, keterbatasan TPS dan sistem pengangkutan menyebabkan pengelolaan sampah tidak efektif, mencemari lingkungan, dan mengurangi kenyamanan warga. Perbaikan ini menciptakan lingkungan lebih bersih dan mengurangi bau tidak sedap. Namun, program belum mencakup tempat sampah individu dan pemilahan sampah masih menjadi kendala. Kesadaran masyarakat yang rendah dalam menjaga kebersihan juga menjadi tantangan, sehingga edukasi dan sosialisasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program.

Pemugaran yang dilakukan oleh Program KOTAKU telah meningkatkan infrastruktur di Kelurahan Bandarharjo, khususnya dalam perbaikan jalan, drainase, dan sistem persampahan. Perbaikan jalan meningkatkan mobilitas dan perekonomian, meskipun beberapa ruas belum tersentuh karena keterbatasan anggaran dan kewenangan. Drainase yang

diperbaiki berhasil mengurangi genangan air dan risiko banjir, tetapi kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan masih menjadi kendala. Dalam pengelolaan sampah, pembangunan TPS dan penyediaan gerobak sampah telah meningkatkan kebersihan lingkungan, namun belum mencakup pemisahan sampah dan penyediaan tempat sampah individu. Secara keseluruhan, pemugaran cukup optimal dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, tetapi keberlanjutan hasilnya masih memerlukan koordinasi lebih lanjut serta peran aktif masyarakat.

2. Peremajaan

Peremajaan adalah rencana penataan kembali permukiman kumuh melalui pembaruan fisik, sosial, dan ekonomi, yang dilakukan dengan pembongkaran bangunan tidak layak, pembangunan kembali prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

a. Sarana Permukiman (RTH dan MCK Umum)

Penyediaan RTH dan MCK umum di Kelurahan Bandarharjo masih terkendala keterbatasan lahan serta pemanfaatan dan pemeliharaan yang belum optimal. Beberapa RTH, seperti taman herbal di RW 12 dan RTH milik PGN di RW 11, kurang dimanfaatkan. Pembangunan MCK di RW 03, RW 05,

dan RW 08 melalui Program KOTAKU serta MCK plus di rumah susun meningkatkan kualitas sanitasi, tetapi penggunaannya menurun seiring bertambahnya fasilitas sanitasi rumah tangga. Beberapa MCK terbengkalai, sementara di RW 01 masih ada rumah tanpa sanitasi layak. Keberlanjutan RTH dan MCK memerlukan strategi pemanfaatan dan pemeliharaan yang lebih baik.

b. Sistem Sanitasi

Program KOTAKU berperan penting dalam memperbaiki sistem sanitasi di Kelurahan Bandarharjo, yang sebelumnya menghadapi permasalahan drainase buruk dan fasilitas sanitasi rumah tangga tidak standar. Program ini membangun drainase yang lebih efektif, merehabilitasi fasilitas sanitasi, serta menerapkan pendekatan berbasis masyarakat melalui program SANIMAS, yang menargetkan 27 titik penerima. Melalui perbaikan infrastruktur dan pelibatan warga, program ini berhasil meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

c. Air Bersih/Minum

Program KOTAKU di Kelurahan Bandarharjo berupaya meningkatkan akses air bersih dengan merehabilitasi unit SPAM, menambah jaringan

perpipaan dan nonperpipaan. Sebelumnya, mayoritas warga bergantung pada sumur dan air artesis dengan kualitas rendah, sementara akses PDAM terbatas, terutama di RW 03. Namun, distribusi air masih belum merata, dan ketergantungan pada air tanah menjadi tantangan. Program ini fokus pada optimalisasi fasilitas tanpa pengeboran baru untuk menciptakan solusi berkelanjutan.

d. Pengamanan Kebakaran

Sebagai permukiman padat, Kelurahan Bandarharjo memiliki risiko kebakaran tinggi, namun penyediaan sarana proteksi kebakaran dalam Program KOTAKU masih terbatas. APAR hanya tersedia di kantor kelurahan, puskesmas, dan rumah susun, tetapi bukan bagian dari program ini. Ketidakmerataan penyediaan alat pemadam kebakaran menjadi tantangan, sehingga diperlukan strategi komprehensif dan kolaborasi pemerintah serta pemangku kepentingan guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan.

Peremajaan yang dilakukan melalui Program KOTAKU di Kelurahan Bandarharjo terkait penyediaan RTH di Bandarharjo masih terkendala keterbatasan lahan di permukiman padat. Beberapa RTH telah dibangun, seperti taman herbal di RW

12, namun pemanfaatannya belum optimal. MCK umum telah tersedia di beberapa RW, tetapi penggunaannya menurun seiring dengan meningkatnya fasilitas sanitasi rumah tangga. Program SANIMAS membantu meningkatkan akses sanitasi melalui pembangunan fasilitas berbasis masyarakat. Penyediaan air bersih mengalami tantangan dalam distribusi yang belum merata, dengan warga masih bergantung pada sumur dan air galon. Sistem penyediaan air minum telah diperbaiki, tetapi belum sepenuhnya optimal. Proteksi kebakaran masih terbatas, dengan APAR hanya tersedia di lokasi tertentu, sehingga diperlukan strategi lebih komprehensif untuk mitigasi kebakaran di permukiman padat.

3. Pemukiman Kembali

Pemukiman kembali merupakan strategi relokasi penduduk ke lokasi yang lebih layak melalui penyediaan hunian, pembangunan infrastruktur, serta pendampingan sosial dan ekonomi.

a. Bangunan Gedung

Pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Bandarharjo berfokus pada peningkatan kualitas permukiman melalui perbaikan infrastruktur skala lingkungan, seperti jalan, drainase, air bersih, pengelolaan sampah, dan sanitasi, tanpa mencakup pembangunan rumah susun. Konsep

permukiman kembali dengan pembangunan hunian baru, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 19 Tahun 2023, tidak sepenuhnya diterapkan dalam program ini. Rumah susun di Bandarharjo sudah ada sebelumnya dan tidak diintegrasikan dalam perencanaan KOTAKU, sehingga fokus utama tetap pada peningkatan infrastruktur di sekitarnya guna menciptakan lingkungan yang lebih layak, sehat, dan berkelanjutan.

Pemukiman Kembali yang dilakukan melalui Program KOTAKU di Bandarharjo berfokus pada perbaikan infrastruktur skala lingkungan, seperti jalan, drainase, air bersih, sampah, dan sanitasi, tanpa mencakup pembangunan rumah susun. Rumah susun yang telah ada tidak diintegrasikan dalam program, karena prioritas utama adalah peningkatan kualitas kawasan kumuh melalui perbaikan infrastruktur dasar. Namun, fasilitas di sekitar rumah susun, seperti jalan dan drainase, tetap diperbaiki untuk menciptakan lingkungan yang lebih layak dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh melalui Program KOTAKU di Kelurahan Bandarharjo Kota Semarang

1. Context

a. Sasaran Program

Program KOTAKU di Kelurahan Bandarharjo telah berlangsung dari 2018 hingga 2023, berfokus pada peningkatan kualitas permukiman kumuh di RW 01-08. Keberhasilan program didukung oleh kepastian legalitas tanah di wilayah tersebut, memungkinkan pelaksanaan tanpa hambatan administratif. Intervensi yang dilakukan mencakup peningkatan pengelolaan sampah, infrastruktur dasar, serta aksesibilitas. Namun, RW 09-11 masih menghadapi kendala legalitas karena kepemilikan PT KAI dan PT Pelindo, sehingga belum dapat menerima manfaat penuh. Untuk keberlanjutan, pemerintah mengupayakan perbaikan melalui Musrenbang, memastikan program tetap berdampak meskipun KOTAKU telah selesai pada 2023.

b. Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat

Keberhasilan Program KOTAKU di Bandarharjo didukung oleh tingginya pemahaman dan keterlibatan masyarakat, yang diperoleh melalui sosialisasi efektif dari BKM dan kelurahan, serta informasi dari media sosial. Partisipasi aktif warga dalam gotong royong dan pekerjaan konstruksi, transparansi informasi,

serta kesempatan menyampaikan masukan meningkatkan kepercayaan terhadap program. Dampak positif berupa perbaikan jalan, drainase, dan lingkungan yang lebih tertata memperkuat dukungan masyarakat. Keberlanjutan program bergantung pada koordinasi antara pemerintah, BKM, dan masyarakat, serta dukungan kebijakan dan pendanaan. Peran tokoh masyarakat dan komunitas lokal juga penting dalam membangun kesadaran kolektif untuk menjaga hasil pembangunan.

Context sebagai faktor pendukung karena kepastian legalitas tanah di RW 01-08 memperlancar pelaksanaan program tanpa hambatan administratif. Program ini berfokus pada pengelolaan sampah dan pembangunan infrastruktur, didukung oleh Musrenbang sebagai wadah untuk memastikan keberlanjutan pasca-KOTAKU 2023. Sosialisasi dari BKM dan kelurahan meningkatkan partisipasi masyarakat, sementara transparansi informasi serta dukungan tokoh masyarakat memperkuat kepercayaan dan kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan. Namun, terdapat faktor penghambat, seperti RW 09-11 yang masih terkendala legalitas lahan milik PT KAI dan PT Pelindo, sehingga belum dapat menerima manfaat sepenuhnya. Keberlanjutan program juga bergantung

pada koordinasi lintas pihak, pendanaan yang stabil, serta kebijakan pemerintah yang mendukung.

2. Input

a. Dukungan Pemerintah

Dukungan pemerintah menjadi faktor utama dalam keberhasilan Program KOTAKU di Bandarharjo melalui penyediaan regulasi, kebijakan strategis, serta pendanaan dari APBN untuk pembangunan infrastruktur. Mekanisme Musrenbang memastikan prioritas pembangunan ditetapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah, BKM, dan pemangku kepentingan lainnya mendukung kelancaran program, didukung oleh rapat rutin dan sosialisasi kepada masyarakat. Pelaksanaan program menggunakan strategi terencana dengan kurva S serta pemetaan kondisi permukiman kumuh untuk intervensi yang tepat sasaran. Pengawasan berkala oleh Disperkim, PUPR, dan BKM memastikan implementasi sesuai standar. Dengan koordinasi yang baik dan keterlibatan masyarakat, program ini berhasil meningkatkan kualitas permukiman secara berkelanjutan.

b. Anggaran

Anggaran berperan krusial dalam keberhasilan Program KOTAKU di Bandarharjo, dengan sumber dana dari APBN dan kontribusi masyarakat. Dana sekitar 1 miliar rupiah digunakan untuk perbaikan infrastruktur, dikelola secara bertahap melalui BKM agar sesuai dengan kebutuhan prioritas. Namun, pada 2020-2021, pandemi COVID-19 menyebabkan refocusing anggaran, mengurangi dana program dan memperlambat pelaksanaan akibat pembatasan mobilitas serta keterbatasan tenaga kerja. Dalam kondisi normal, pengelolaan anggaran yang baik menjadi faktor pendukung, tetapi dalam situasi darurat, aspek finansial bisa menjadi hambatan. Diperlukan strategi anggaran yang fleksibel serta sumber pendanaan alternatif untuk keberlanjutan program.

c. Durasi Waktu Pelaksanaan Program

Durasi pelaksanaan Program KOTAKU di Bandarharjo menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas program, dengan rata-rata waktu 90 hari untuk menyelesaikan satu jenis infrastruktur. Namun, durasi dapat bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan, skala, sumber daya, cuaca, dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Faktor penghambat utama meliputi kondisi cuaca yang

tidak menentu, tingkat kesulitan pekerjaan, keterbatasan tenaga kerja, serta keterlambatan pasokan material. Meskipun perencanaan dan koordinasi telah optimal, faktor eksternal ini sering mempengaruhi jadwal proyek. Oleh karena itu, diperlukan strategi mitigasi yang lebih baik untuk memastikan kelancaran program sesuai target waktu.

d. Akses Informasi

Akses informasi memainkan peran penting dalam keberhasilan Program KOTAKU di Bandarharjo, karena pemahaman yang baik meningkatkan partisipasi masyarakat. Sosialisasi dilakukan secara sistematis melalui BKM, kelurahan, RW, RT, dan tokoh masyarakat, serta disebarakan melalui pertemuan langsung, grup WhatsApp, dan rapat RT. Informasi yang jelas membantu masyarakat memahami tujuan program, meningkatkan keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan infrastruktur. Faktor pendukung keberhasilan meliputi koordinasi yang baik, keterlibatan pemangku wilayah, serta pemanfaatan berbagai saluran komunikasi. Transparansi informasi dan partisipasi masyarakat menjadi kunci efektivitas program berbasis komunitas ini.

Input sebagai faktor penghambat karena tantangan dalam pengelolaan anggaran dan koordinasi program, seperti refocusing anggaran saat pandemi yang menyebabkan keterbatasan dana, keterlambatan pencairan, serta hambatan administratif dan logistik. Faktor lain seperti cuaca yang tidak menentu, keterbatasan tenaga kerja, dan kurangnya akses informasi bagi sebagian warga juga memperlambat efektivitas program. Namun, terdapat faktor pendukung, yaitu peran aktif pemerintah dalam menyediakan regulasi, alokasi dana APBN, serta koordinasi antara pemangku kepentingan seperti BKM dan masyarakat. Pengelolaan anggaran yang terstruktur serta akses informasi yang jelas turut memperlancar pelaksanaan program.

3. Process

a. Kualitas Infrastruktur

Pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Bandarharjo menghadapi berbagai hambatan dalam perbaikan drainase, jalan, dan pengelolaan sampah. Penumpukan sampah di drainase memperlambat pengerjaan dan diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan. Pada perbaikan jalan, perbedaan ketinggian rumah warga terhadap jalan menimbulkan

ketidaknyamanan, sementara resistensi masyarakat akibat kurangnya pemahaman juga menjadi kendala. Dalam pengelolaan sampah, keterbatasan kapasitas TPS, ketidakteraturan pengangkutan, serta kebiasaan membuang sampah sembarangan menyebabkan penumpukan sampah dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat, mekanisme pemeliharaan yang lebih baik, serta optimalisasi sistem pengelolaan sampah untuk menjamin keberlanjutan program.

b. Kapasitas dan Kelembagaan (SDM)

Sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam keberhasilan Program KOTAKU di Kelurahan Bandarharjo, terutama melalui keterlibatan masyarakat dan tenaga profesional dalam pelaksanaan serta pemeliharaan infrastruktur. Partisipasi aktif warga dalam proyek pembangunan tidak hanya meningkatkan rasa kepemilikan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Program ini juga memberikan pelatihan bagi pekerja dan anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) guna meningkatkan keterampilan mereka dalam pengelolaan infrastruktur. Selain

itu, budaya gotong royong yang masih kuat mendukung keberlanjutan program melalui kerja bakti rutin dalam menjaga kebersihan dan merawat fasilitas yang telah diperbaiki. Dengan adanya keterlibatan aktif, pelatihan, dan semangat gotong royong, program KOTAKU di Bandarharjo berhasil meningkatkan kualitas permukiman serta kesejahteraan masyarakat.

Process sebagai faktor penghambat karena rendahnya kesadaran pemeliharaan infrastruktur, penumpukan sampah akibat keterbatasan kapasitas TPS, serta ketidaknyamanan warga akibat perbedaan ketinggian rumah dan jalan yang diperbaiki. Sosialisasi sebelum program berjalan cukup efektif, tetapi perubahan perilaku dalam menjaga kebersihan masih menjadi tantangan utama. Namun, terdapat faktor pendukung, yaitu keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap program melalui pelatihan dan budaya gotong royong. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan rasa memiliki, tetapi juga mendukung keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun.

4. Product

a. Peningkatan Akses Layanan Dasar

Program KOTAKU di Kelurahan Bandarharjo berfokus pada peningkatan akses layanan dasar melalui perbaikan jalan lingkungan, sistem drainase, serta fasilitas umum untuk meningkatkan mobilitas, mengurangi banjir, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Keberhasilan program ini didukung oleh koordinasi antara pemerintah daerah, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), serta partisipasi aktif warga. Peningkatan kualitas infrastruktur, seperti perbaikan jalan dan fasilitas pembuangan sampah, telah menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan aman. Meskipun program telah berakhir, keberlanjutan manfaatnya bergantung pada pemeliharaan yang dilakukan oleh BKM, Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat (KPP), serta Pemerintah Kota Semarang. KPP yang terdiri dari ketua RW berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan dan dapat bekerja sama dengan pihak swasta melalui program CSR atau meminta dukungan pemerintah jika terjadi kerusakan besar. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan infrastruktur yang telah dibangun tetap berfungsi optimal dalam jangka panjang.

Product sebagai faktor pendukung karena perbaikan infrastruktur telah

meningkatkan mobilitas dan kualitas hidup masyarakat. Pemeliharaan didukung oleh BKM dan KPP, serta akses ke program CSR dan bantuan pemerintah untuk menjaga keberlanjutan manfaat program.

Kesimpulan

Program KOTAKU di Kelurahan Bandarharjo telah berkontribusi positif dalam meningkatkan kualitas permukiman kumuh, terutama dalam aspek pemugaran. Peningkatan infrastruktur dasar, seperti jalan lingkungan dan drainase, telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meskipun masih terdapat beberapa ruas jalan yang belum diperbaiki dan permasalahan banjir rob yang belum sepenuhnya teratasi. Dalam aspek perumahan, program ini masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan ruang terbuka hijau, akses sanitasi yang belum merata, serta kurangnya pengamanan kebakaran. Sementara itu, aspek pemukiman kembali belum menunjukkan hasil yang optimal, karena belum adanya skema relokasi yang efektif bagi warga di kawasan rawan bencana.

Keberhasilan program ini didukung oleh regulasi pemerintah, alokasi anggaran, koordinasi antar pemangku kepentingan, serta partisipasi masyarakat. Namun, hambatan seperti refocusing anggaran akibat pandemi, keterbatasan tenaga kerja

dan material, serta kendala legalitas lahan masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan manfaat program ini, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan infrastruktur, fleksibilitas anggaran, serta penyelesaian permasalahan legalitas lahan. Dengan koordinasi yang lebih baik, diharapkan Program KOTAKU dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat Bandarharjo.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Banyak infrastruktur dasar seperti jalan, saluran drainase, dan penyediaan air bersih yang belum tersentuh perbaikan, sehingga perlu dilakukan identifikasi area yang belum mendapatkan perbaikan dan melibatkan masyarakat dalam perencanaannya.
2. Kualitas air bersih masih rendah dan ketergantungan pada air tanah tinggi, sehingga perlu diperluas jaringan perpipaan dan bekerja sama dengan PDAM serta penyedia air lainnya untuk meningkatkan distribusi air bersih.

3. Sistem pengelolaan sampah belum optimal, dengan jadwal pengangkutan yang kurang efektif dan minimnya TPS, sehingga perlu dilakukan optimalisasi jadwal pengangkutan, penambahan TPS, serta pembentukan bank sampah berbasis komunitas untuk meningkatkan pengelolaan sampah dan memberikan nilai ekonomi bagi warga.
4. Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih minim dan kurang dimanfaatkan, sehingga perlu identifikasi lahan kosong yang potensial serta kolaborasi dengan sektor swasta melalui program CSR untuk pengadaan dan pengelolaan RTH.
5. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan masih rendah, sehingga perlu edukasi berkelanjutan melalui pelatihan, kampanye kebersihan, serta pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan dan infrastruktur.
6. Risiko kebakaran di permukiman padat masih tinggi akibat kurangnya alat pemadam, sehingga perlu pendistribusian APAR ke wilayah RW/RT serta pelatihan kesiapsiagaan kebakaran bagi warga.
7. Skema pemukiman kembali dengan merenovasi bangunan rumah susun yang sudah ada agar lebih layak huni, sekaligus menyediakan hunian alternatif yang terjangkau bagi warga terdampak relokasi.
8. Legalitas lahan masih menjadi kendala dalam relokasi warga, sehingga perlu koordinasi yang lebih intensif dengan pemilik lahan seperti PT KAI dan PT Pelindo untuk mencari solusi terbaik bagi warga terdampak.
9. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta masih lemah, sehingga perlu peningkatan koordinasi antar instansi serta dorongan bagi sektor swasta untuk berperan lebih aktif dalam penyediaan infrastruktur melalui program CSR.
10. Keterbatasan anggaran dan sumber daya sering menghambat pelaksanaan program, sehingga perlu penyusunan perencanaan anggaran yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kondisi darurat serta mencari sumber pendanaan alternatif seperti hibah internasional atau bantuan dari pemerintah pusat.

Daftar Pustaka

- Abubakar, H. R. I. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Afifuddin, B. A. S., & Saebani, B. A. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Agustin, I. W., & Hariyani, S. (2023). *Pengelolaan Infrastruktur Kota dan Wilayah*. Universitas Brawijaya Press.
- Akbar, M. F., & Mohi, W. K. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Andi Dirga, Y. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Anindita, N. P., Rostyaningsih, D., & Lestari, H. (2021). Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kotaku Di Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara/85/Adm. Publik/2021 (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Science).
- Anisyaturrobiah, A. (2021). Dampak Urbanisasi Terhadap Penyediaan Pemukiman Dan Perumahan Di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 42–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jebaku.v1i2.136>
- Anwaruddin, A. (2004). *Pasang Surut Paradigma Administrasi Publik*. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 1(2), 1-16.
- Arikunto, S., & Jabar S.C.(2010). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Arikunto, Suharsimi, (2004). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aswar, N., & Harahap, A. (2021). Evaluasi Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak. *JAPB*, 4(2), 844-858.
- Budi, W. (2008). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Cahya, A. D., Mulyadi, A., & Sampurna, R. H. (2023). Evaluation Program in Handling Cities without Slum Settlements (Kotaku) in Sukabumi City. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 12(1), 1-8.
- Dewi, D. S. K. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Bantul DI Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Duadji, N., & Tresiana, N. (2018). *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Bandar Lampung: AURA (CV Anugrah Utama Raharja).
- Dye, T. R. (2005). *Understanding Public Policy, Eleventh Edition*, New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Fischer, F., Miller, G.J., Sidney, M. S. (eds.). (2007). *Handbook of Public Policy analysis: Theory, Politics and Methods*. USA: CRC Press.
- Gilbert, A. (2005). Book Review: The challenge of slums: global report on human settlements 2003. In *Progress in Human Geography* (Vol. 29, Issue 1). <https://doi.org/10.1177/030913250502900122>
- Greer, Alan and Paul Hoggett. 1999. "Public Policies, Private Strategies and Local Public Spending Bodies". in *Public Administration*. Vol. 77No. 2 1999pp. 235-256.
- Griffin, P., dan Nix., P. 1991. *Educational Assessment and Reporting*. Sydney: Harcourt Brace Javanovich, Publisher.
- Hadi, A., Bedasari, H., & Ikhsan, M. (2023). Evaluasi Kebijakan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh Di Kawasan Kota Lama Kota Pekabaru. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 4(1), 43-49.

- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya, 323.
- Hayat, H., Malang, U. I., Pendapatan, P., & Usaha, P. (2018). *Buku Kebijakan Publik*. Universitas Islam Malang Malang, Indonesia.
- Henry, N. (1988). *Administrasi Negara Dan Masalah-Masalah Kenegaraan*. (L. D. Lontoh, Trans.) Jakarta: Rajawali.
- Hill, M., & Hupe, P. (2002). *Implementing Public Policy*. London, California, and New Delhi: Sage Publication.
- Ikeanyibe, O. M., Eze Ori, O., & Okoye, A. E. (2017). Governance paradigm in public administration and the dilemma of national question in Nigeria. *Cogent Social Sciences*, 3(1), 1316916.
- Islamy, M.I. (2007). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keban, Y. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Lasulika, K., Akbar, M. F., & Alkatiri, R. (2021). Policy Evaluation of Livable Houses Programs in Gorontalo City. *Journal of Public Representative and Society Provision*, 1(1), 14-21.
- Maksudi, B. I. (2017). *Dasar-Dasar Administrasi Publik: Dari Klasik ke Kontemporer*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosdakarya.
- Mutrofin. (2005). *Pengantar Metode Riset Evaluasi (Kebijakan, Program dan Proyek)*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Nugroho, R. (2009). *Public Policy*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Pasolong, H. (2017). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Momor 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024.
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019.
- Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh Tahun 2022-2026.
- Post, J. E., et al. (1999). *Business and Society Corporate Strategy, Public Policy, Ethics Ninth Edition*. New York: The MacGrawHill Companies, Inc.
- Prasetyanti, R. (2021). Penataan Permukiman Kumuh Terintegrasi Di Kota Semarang. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 7(1), 55-75.
- Prayojana, T. W., Mardhatil, M., Fazri, A. N., & Saputra, B. (2020). Dampak Urbanisasi Terhadap Pemukiman Kumuh (Slum Area). *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan*, 1(2), 60-69.
- Program (PKH) in Poverty Alleviation. *Integration: Journal Of Social Sciences And Culture*, 1(2), 145-157.
- Purba, J. E. A., & Marom, A. (2021). Analisis Peran Aktor Dalam Implementasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Bandarharjo Semarang Utara, Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(2), 547-565.
- Rahmawati, D. A. (2024). Evaluation of the Use of the Electronic Based Public Complaints Application (Halomasbup) in Kediri Regency. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 8(2), 1199-1203.
- Rodiyah, I., Sukmana, H., & Mursyidah, L. (2021). *Buku Ajar: Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Sakdiah, C., & Rahmawati, D. (2021). Strategi penanganan permukiman kumuh kawasan DAS Metro Kota Malang berdasarkan prinsip

- Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Teknik ITS*, 9(2), C223-C230.
- Saleh, D. (2021). Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kota Sukabumi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5), 1557-1564.
- Sjamsuddin, S. (2006). *Dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik*. Yayasan pembangunan Nasional Malang.
- Stark, J.S., & Thomas, A. (1994). *Assessment and Program Evaluation*. Needham Heights: Simon & Schuster Custom Publishing.
- Stiawan, Y., Mulyadi, A., & Basori, Y. F. F. (2023). Evaluation Of The Social Rehabilitation Program For Unfitable Houses (Rs-Rtlh) In Cikembar District Sukabumi District. *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 21(02), 317-328.
- Stufflebeam, D. L., Shinkfield, A. J. (1985). *Systematic evaluation: a self-instructional guide to theory and practice*. Kluwer Academic Publishers.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Surat Edaran Nomor: 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh.
- Surat Keputusan Walikota Semarang No. 050/275 Tahun 2021 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Semarang.
- Tahir, A. (2018). *Kebijakan Publik & Good Governancy*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press.
- Thoha, M. (2007). *Birokrasi dan Politik Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Thomas R. Dye, (2002). *Understanding Public Policy*. Toronto.
- Trifita, A., & Amaliyah, R. (2020). Ruang Publik dan Kota Berkelanjutan: Strategi Pemerintah . *Global & Policy*, 159-174.
- Wahab, S. A. (2016). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, J. (2007). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Zubaidah, S., Rusli, B., Saefullah, A. D., & Widianingsih, I. (2023). An overview of slum upgrading programs in developing countries: Case study in Indonesia. *Cogent Arts & Humanities*, 10(2), 2264021. <https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2264021>